

**DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG
PAJANG**

**LAPORAN
KINERJA
TAHUN 2024**

**JALAN PROF. DR. SRI SOEDEWI,MS, SH – KUALA
TUNGKAL**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang atas ridho-Nya, **Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** dapat merumuskan dan menyusun **LAPORAN KINERJA (LKj) Tahun 2024**. Penyusunan **Laporan Kinerja (LKj)** ini sangat diperlukan untuk sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan lebih memantapkan pelaksanaan **Akuntabilitas** sebagai perwujudan **Good Goverment**.

Pelaporan KINERJA merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk dari Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada **Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** atas penggunaan anggaran, yang mana SAKIP itu sendiri diperlukan untuk pengukuran hasil dan capaian kinerja pelayanan OPD.

Tersusunnya **LKj** ini diharapkan akan terciptanya keterbukaan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan** dan **Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semoga **Laporan Kinerja (LKj)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya mewujudkan **Good Goverment**.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



D A F T A R I S I

	Halaman	
HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		
i		
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Kedudukan dan Fungsi	2
1.3.	Susunan Organisasi	3
1.4.	Sumber Daya Dinas Perkebunan dan Peternakan	6
1.5.	Isu – isu Strategis	10
1.6.	Maksud dan Tujuan	12
1.7.	Sistematika Penulisan	13
BAB II	Perencanaan Kinerja	
2.1.	Rencana Strategis (2021-2026)	14
2.2.	Indikator Kinerja Utama	25
2.3.	Rencana Kinerja Tahun 2024	27
2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	
3.1.	Kerangka Pengukuran Kinerja	39
3.2.	Capaian Kinerja	42
3.3.	Evaluasi Capaian Kinerja	66
3.4.	Realisasi Anggaran	67
BAB IV	Penutup	79
4.1.	Kesimpulan	79
4.2.	Saran dan Rekomendasi	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik..

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai sub sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah , melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah kabupaten, propinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna , bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah : (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini merupakan salah satu dari wujud akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran serta target yang telah ditetapkan.

Terkait dengan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021- 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024, RKT serta Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perkebunan dan Peternakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta

- penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangka Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perkebunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Peternakan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.
 - 1. UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan

Secara lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada gambar dibawah berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



1.4. SUMBER DAYA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah mencakup sumber daya aparatur, sarana prasarana yang dimiliki serta asset lainnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melibatkan unsur aparatur dengan jumlah, status dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam tabel – tabel berikut ini :

Tabel 1.1. : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	8
2.	III	19
3.	II	4
4.	I	-

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2024

Tabel 1.2. : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Alokasi Unit Kerja Tahun 2024

No.	Unit Kerja	PNS	TKK	JUMLAH
1.	Sekretariat	9	11	19
2.	Bidang Perkebunan	4	5	9
3.	Bidang Peternakan	9	6	15
4.	Bidang Prasarana dan Sarana	4	5	9
5.	Bidang Penyuluhan	3	5	8
6.	UPT Perlindungan Tanaman	1	1	2
7.	UPT Puskeswan dan IB	1	-	1
	JUMLAH	31	33	63

Sumber : Data ASN dan TKK Disbunak Tahun 2024

Tabel 1.3. : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	1
2.	S1	26
3.	D3	0
4.	D2	0
5.	D1	0
6.	SLTA	4
7.	SLTP	0
8.	SD	0

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2024

Tabel 1.4. : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
A.	Struktural	
	Eselon II.a	1
	Eselon III.a	1
	Eselon III.b	4
	Eselon IV.a	1
	Eselon IV.b	2
B.	Fungsional	
	Fungsional	13
C.	Pelaksana	9
	JUMLAH	31 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2024

2. Kelembagaan

Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejauh ini ditangani oleh berbagai kelembagaan formal maupun informal dengan peran dan fungsinya yang secara umum sudah terbagi secara proposional, meskipun demikian dari teknis dan non teknis pelaksanaan fungsi dan peran kelembagaan tersebut belum dapat terfasilitasi secara optimal.

Aspek kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan terutama sekali jika dikaitkan dengan kelembagaan formal sebagai pengawal kebijakan pembangunan perkebunan dan peternakan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan

di Kabupaten Tanjung Jabung Barat disamping secara formal ditangani oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga banyak melibatkan peran dari lembaga formal maupun informal lainnya, antara lain :

- a. Lembaga Tingkat Pusat yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam proses pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Medan, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, serta beberapa UPT Pusat yang secara khusus menangani komoditas tanaman perkebunan.
- b. Lembaga Tingkat Provinsi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik langsung maupun tidak langsung antara lain yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP) Provinsi Jambi, UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (BPPBTP) Provinsi Jambi serta Balitbangda Provinsi Jambi.
- c. Organisasi/kelembagaan yang terkait dengan pembangunan perkebunan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Asosiasi Petani Kelapa Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Petani Karet Indonesia, Masyarakat Pencinta Indikasi Geografis (MPIG) Kopi dan Pinang, Asosiasi Petani Rempah Indonesia serta LSM Setara.

3. Sarana dan Prasarana

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejauh ini juga telah ditunjang oleh keberadaan sarana prasarana yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain berupa Kebun Sumber Benih Kopi Libtukom, Kebun Percontohan Kopi Libtukom, Kebun Percontohan Kelapa Sawit, UPT Puskeswan dan IB, UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan, Kandang Ternak di Bram Itam, Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Perkebunan dan Peternakan serta Prasarana Budidaya (saluran Tata Air Mikro, Lantai Jemur Pinang dan Jalan Produksi).

Upaya penyediaan sarana prasarana perkebunan dan peternakan tersebut telah dilakukan melalui dukungan anggaran APDB maupun APBN yang bersifat stimulant untuk mendorong masyarakat/petani dalam memfasilitasi kebutuhannya secara swadaya.

Adapun sarana prasarana aparatur yang mendukung aktivitas pokok dan secara langsung dikelola oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan serta merupakan aset dinas adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.5. : Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Dinas	2 unit	Baik
2.	UPT Perlindungan Perkebunan	1 unit	Baik
3.	UPT IB dan Puskeswan	4 unit	3 unit Baik, 1 unit perlu di rehab
4.	Kebun Pembibitan Kelapa Sawit	2	Rusak Ringan
5.	Kebun Percontohan Kelapa Sawit	1	Baik
6.	Kebun Percontohan Kopi Libtukom	1 Ha	Baik
7.	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1 unit	Baik
8.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)	3 unit	Baik
9.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)	45 unit	Baik
10.	Kendaraan Roda 3 (Viar)	1 unit	rusak ringan

Sumber data : Laporan Aset dan Bangunan bulan Desember 2024

1.5. ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu – isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan isu – isu strategis yang sedang terjadi maupun isu – isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi Sumber Daya Manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas juga mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pembangunan perkebunan dan peternakan yang masih menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diinventarisasi dan dipetakan dalam suatu pohon masalah untuk pemahaman dalam penentuan kebijakan.

Pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan selama tahun 2024 dihadapkan kepada beberapa permasalahan aktual yang bersifat isu strategis sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Perkebunan					
Produktivitas Komoditi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan : - Kelapa Sawit - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang - Karet	Produktivitas Komoditi Perkebunan tahun sekarang dibagi produktivitas komoditi perkebunan tahun lalu	a. SDM Petugas Bidang Perkebunan b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan c. Banyak tanaman tua/tanaman rusak	a. Pengetahuan petani yang masih rendah dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna. b. Perubahan iklim dan bencana alam c. Masih tingginya serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan d. Ketersediaan bibit unggul pinang, kopi dan kelapa dalam e. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi	a. Masih kurangnya anggaran yang langsung bersentuhan dengan petani b. Kurangnya pelatihan yang berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan c. Kurangnya SDM teknis d. Pengetahuan SDM Bidang Perkebunan dalam penguasaan teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan

				<p>pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan</p> <p>f. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah</p>	
<u>Bidang Peternakan</u>					
Populasi ternak.	<p>Populasi ternak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sapi - Kerbau - kambing - Domba - Unggas 	Laju pertumbuhan populasi ternak sebesar 1,2 % per tahun	<p>a. Masih perlunya peningkatan SDM Petugas peternak</p> <p>b. Masih adanya kematian pedet (anak sapi), abortus pada ternak dan interval kelahiran yang masih jauh</p> <p>c. Minimnya sarana dan prasarana</p> <p>d. Kurangnya tenaga medis dan paremedis</p> <p>e. Belum tersedianya HPT Unggul</p>	<p>a. Masih adanya pemotongan ternak betina produktif</p> <p>b. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas</p> <p>c. Masih adanya Pencurian ternak</p> <p>d. Masih adanya keluar masuk ternak yang tidak terdata</p>	<p>a. Kurangnya tenaga medis dan paramedis</p> <p>b. Kelembagaan dan SDM Peternak dan Tenaga Teknis</p> <p>c. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan teknis</p>

Sumber : Renstra Disbunak Tahun 2021-2026

Permasalahan aktual tersebut selama kurun waktu tahun 2024 telah diupayakan untuk diatasi melalui berbagai langkah pelaksanaan Program/Kegiatan dari sumber anggaran APBD, APBN dan sumber lainnya yang substansinya merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan sebagaimana telah dikemas di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan yang harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah berhasil dicapai.

LKj ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban Kepala OPD kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan selama Tahun 2024 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKj ini.

Dalam LKj ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan pada Tahun 2024, yang diselenggarakan melalui 7 (tujuh) Program, yang terdiri dari yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang dengan 8 (delapan) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Program Pokok dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan, yang mana keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyesuaikan dengan metode penulisan yang disajikan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian tersebut adalah sebagai berikut :

- Bagian Sampul dan Pengantar berisi sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.
- Bab I Pendahuluan
Berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja
Menyajikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
Berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang telah digunakan.
- Bab IV Penutup
Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (2021 - 2026).

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme kepemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakikatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja (LKj) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKj ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah dirumuskan pada tahun 2021, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat Tahun 2021-2026 tersebut, adalah sebagai berikut :

2.1.1. VISI dan MISI Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian serta melihat potensi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkepentingan membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan **Visi Pembangunan** Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Mengandung Makna bahwa : “Mewujudkan pembangunan Perkebunan dan

Visi :

***Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan
Harmonis)***

Peternakan dalam suatu penataan wilayah yang berwawasan lingkungan melalui pengintegrasian kegiatan *produksi, pengolahan, distribusi* kegiatan *On Farm* dan *Off Farm* dalam suatu **Sistem Manajemen** dengan menciptakan *Produk-Produk Unggulan* Perkebunan dan Peternakan yang memiliki daya saing dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan ketersediaan pangan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan **5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026** sebagai berikut:

KODE	MISI
MISI 1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhhlak

MISI 2	Mewujudkan kondisi sosial yang tenram, tertib dan demokratis
MISI 3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
MISI 4	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
MISI 5	Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021- 2026 yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pada **Misi Ketiga**, yaitu **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik**, dan **Misi Keempat**, yaitu **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut adalah dengan Program dan Kegiatan prioritas pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan, agar sektor Perkebunan dan Peternakan bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, sehingga diharapkan sektor Perkebunan dan Peternakan bisa menjadi program/kegiatan unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.1.2. TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka ditetapkanlah **Tujuan Strategis**.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis** Pembangunan Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis** yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2023. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis** dapat mengkonfirmasikan **Tujuan Strategis** yang akan dicapai pada masa mendatang. Hal tersebut tergambar sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor perkebunan dan peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan secara optimal	1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :						
			- Kelapa Sawit	121.136	123.074	125.166	127.419	129.840	132.437
			- Karet	3.833	3.848	3.867	3.890	3.913	3.936
			- Kelapa dalam	55.050	55.490	55.989	56.549	57.171	57.800
			- Kopi	1.189	1.194	1.200	1.207	1.215	1.224
			- Pinang	10.557	10.663	10.780	10.909	11.039	11.182
		2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) :						
			- Sapi	9.086	9.267	9.452	9.641	9.833	10.029
			- Kerbau	744	758	773	788	803	819
			- Kambing	48.216	49.180	50.163	51.166	52.189	53.232
			- Domba	829	845	861	878	895	912
			- Unggas	1.493.393	1.523.260	1.553.260	1.584.799	1.616.494	1.648.823
2.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	69.60	69.80	69.90	70,10	70.20	70.30
			- Nilai IKM Perangkat Daerah	80.25	80.30	80.35	80.40	80.45	80.50

Sumber : Renstra Disbunak Tahun 2021-2026

2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

Strategi:

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan petani/pekebun.
2. Peningkatan Populasi dan Produksi ternak secara optimal.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Kebijakan

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Perternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. **Kebijakan Umum** Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Perternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien.
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan.
4. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.

5. Mewujudkan Pengendalian Bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan dan penanganan, pengendalian kebakaran lahan kebun serta gangguan usaha perkebunan.
6. Terwujudnya fasilitas pembinaan dan penanganan usaha berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
7. Mendorong penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
8. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di jajaran Domestik dan Internasional
9. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang baik
10. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan/peternakan melalui bantuan – bantuan alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil produksi
11. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun/peternak melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat
12. Peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Inseminasi Buatan
13. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan
14. Peningkatan sumber – sumber pakan ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas
15. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos, Biogas (Chopper) serta meningkatkan sarana operasional petugas lapangan
16. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan melalui bantuan alsintan dan peralatan teknologi peternakan

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026

VISI : ‘‘MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH’’ (BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS)			
MISI 4 : “ <i>Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan</i> ”.			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi sub sector perkebunan dan peternakan berbasis sumber daya alam lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan secara optimal	Meningkatkan produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun/petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan 2. Meningkatkan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan 3. Mewujudkan Pengendalian Bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan dan penanganan, pengendalian kebakaran lahan kebun serta gangguan usaha perkebunan 4. Terwujudnya fasilitas pembinaan dan penanganan usaha berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan 5. Mendorong penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan 6. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di jajaran Domestik dan Internasional 7. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang baik 8. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan/peternakan melalui bantuan – bantuan alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil produksi 9. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun/peternak melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Inseminasi Buatan 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan

	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Peningkatan populasi dan produksi ternak secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan sumber – sumber pakan ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas 4. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos, Biogas (Chopper) serta meningkatkan sarana operasional petugas lapangan 5. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan melalui bantuan alsintan dan peralatan teknologi peternakan
--	---------------------------------	---	---

MISI 3 : “ Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ”.

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan publik dan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan 2. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien

Sumber : Renstra Disbunak Tahun 2021-2026

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan telah mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata pemerintahan yang baik, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Peraturan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaiansuatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, dari kinerja ini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu kepada Renstra 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024
1.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan menjaga kelestarian lingkungan	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan secara Optimal 2. Meningkatnya Populasi Ternak	1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang 2. Jumlah Populasi Ternak - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	Jumlah Produksi pada tahun t) Mengukur populasi ternak pada tahun sekarang (t) = jumlah populasi ternak tahun lalu + kelahiran + pemasukan – kematian – pengeluaran – pemotongan	127.419 3.890 56.549 1.207 10.909 9.641 788 51.166 878 1.584.799

Sumber : Renstra Disbunak Tahun 2021-2026

2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang memuat target-target capaian indikator Sasaran Strategis, Sasaran Program, maupun Sasaran Kegiatan, dengan mempertimbangkan Isu Strategis, Arah Kebijakan Pembangunan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahun 2024 sendiri dengan anggaran sebesar Rp. 14.870.457.441.- (empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) yang diselenggarakan melalui 7 (tujuh) Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang dengan 6 (enam) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Program Pokok dengan 12 (dua belas) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, yang mana keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD II Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), adalah sebagai berikut :

1.	Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2.	Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3.	Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan Sanksi
4.	Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5.	Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

2.4.1. PERJANJIAN KINERJA UTAMA

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah (Bupati), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam **Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2026**. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis OPD.

Untuk Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis berdasarkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini:

**Target Penetapan Kinerja Utama
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	TARGET 2024
----	-------------------	---------------------	-------------

1	2	3	4
1.	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan Perkebunan (ton)	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) : - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang	127.419 3.890 56.549 1.207 10.909
	2. Meningkatnya Populasi Ternak (ekor)	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) : - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	9.641 788 51.166 878 1.584.799

2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah - Nilai IKM Perangkat Daerah	70.10 80.40
---	--	---	--------------------

Sumber : Renstra Disbunak Tahun 2021-2026

2.4.2. PERJANJIAN KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)

Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Unit Kerja Eselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (Outcome).

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kegiatan yang disepakati antara Kepala Bidang Eselon III dan Kasubbag/Fungsional/ Eselon IV merupakan Indikator Kinerja (Output). Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja Program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran **Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024**. Adapun untuk tahun 2024 ini Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan yang dimaksud adalah sebagaimana terlampir.

Perjanjian Kinerja Program (Outcome) Tahun 2024
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2024	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.	1. Meningkatnya Produksi komoditi perkebunan (ton)	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1. Persentase peningkatan produktivitas komoditi perkebunan 2. Angka Penanggulangan OPT dan gangguan usaha perkebunan 3. Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya 4. Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan 5. Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,8%, karet = 0,6 %, kelapa dalam = 1,0%,kopi = 0,6% pinang = 1,2% 2. 100 % 3. 23 % 4. 750 STDB 5. 30 %	Kepala Bidang Perkebunan Kepala Bidang Perkebunan Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Sapras dan Kepala Bidang Peternakan Kepala Bidang Sapras Kepala Bidang Penyuluhan
	2. Meningkatnya populasi ternak (ekor)	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	6. Angka kebuntingan sapi yang di IB 7. Angka Kematian Ternak	6. Angka Kebuntingan Sapi = 73 % 7. 1.5 %	Kepala Bidang Peternakan Kepala Bidang Peternakan
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah - Nilai IKM Perangkat Daerah	70.10 % 80.40 %	Sekretaris Sekretaris

Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2024

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target 2023	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Meningkatnya Produksi komoditi perkebunan (ton)	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1. Persentase peningkatan produktivitas komoditi perkebunan 2. Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya 3. Angka Penanggulangan Serangan OPT dan Gangguan Usaha Perkebunan 4. Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan 5. Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok tani dan informasi sektor perkebunan/peternakan	1. Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pendukung perkebunan 2. Meningkatnya penjaminan kemurnian, kelestarian, pemanfaatan dan kualitas SDG Tanaman 1. Bertambahnya jumlah prasarana yang mendukung produktivitas sektor perkebunan 1. Terkendalinya OPT Tanaman Perkebunan dan Penanganan Kebakaran Lahan /Kebun Masyarakat 1. Meningkatnya petani pekebun yang memiliki STDB 1. Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Kelembagaan serta penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyuluhan pertanian	100 % 100 % 27 unit 100 % 100 % 53 unit	Kabid Perkebunan Kabid Sapras Kabid Perkebunan Kabid Sapras Kabid Penyuluhan
	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	1. Angka kebuntingan sapi yang di IB	1. Meningkatnya Penjaminan Kemurnian kelestarian, kualitas SDD Hewan	1. 100 %	Kabid Peternakan

			2. Angka Kematian Ternak	<p>2. Meningkatnya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</p> <p>3. Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah</p> <p>1. Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak</p> <p>2. Terlaksananya pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan</p> <p>3. Terlaksananya pelayanan jasa medik veteriner</p>	<p>2. 800 ekor, 0,25 ton</p> <p>3. 1 Laporan</p> <p>1. 100 %</p> <p>2. 1 laporan</p> <p>3. 1 laporan</p>	
2..	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai AKIP Perangkat Daerah - Nilai IKM Perangkat Daerah 	<p>1. Jumlah Dokumen Renstra, Renja,DPA,Evaluasi Renstra,Evaluasi Renja dan Lakip</p> <p>2. Laporan Keuangan Tahunan OPD</p> <p>3. Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN</p> <p>4. Cakupan Layanan Administrasi Umum</p> <p>5. Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemda</p> <p>6. Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda</p> <p>7. Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda</p>	<p>1. 13 dokumen</p> <p>2. 1 laporan</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p>	Bidang Sekretariat

2.4.3. PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024

Adapun Pagu Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3
	TOTAL APBD	14.870.457.441.-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.755.114.072.-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.582.000.-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.450.000.-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.132.000.-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.700.768.372.-
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.481.408.372.-
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	219.360.000.-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.600.000.-
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.600.000.-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.131.700.-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.898.000.-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.066.000.-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.495.000.-
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.742.500.-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000.-

	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	524.930.200.-
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.358.000.-
	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.590.000.-
	13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.768.000.-
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.546.000.-
	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.800.000.-
	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.546.000.-
	16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.200.000.-
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.128.000.-
	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	191.838.000.-
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	211.470.000.-
	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.540.000.-
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.280.000.-
2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.448.894.650.-
8		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	538.225.000.-
	21	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	538.225.000.-
9		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	765.579.650.-
	22	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	377.407.650.-
	23	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	296.587.000.-
	24	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	91.585.000.-
10		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	145.090.000.-
	25	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lainnya	34.500.000.-
	26	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	110.590.000.-
3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.057.840.698.-

11	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.795.926.750.-
27	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1.795.926.750.-
12	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.178.663.948.-
28	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	600.000.000.-
29	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.254.663.948.-
30	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	324.000.000.-
12	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	83.250.000.-
31	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	83.250.000.-
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.895.556.091.-
13	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.844.198.591.-
32	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam satu kabupaten/kota	1.844.198.591.-
14	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	15.646.500.-
33	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ Pengeluaran Hewan, Produk dan Media Pembawa Penyakit Hewan (HPM)	15.646.500..-
15	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.711.000.-
34	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	35.711.000.-
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	334.622.930.-
16	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	334.62230.-
35	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	140.863.530.-
36	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	193.759.400.-
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	142.780.000.-
17	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	142.780.000.-
37	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	142.780.000.-

7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	235.649.000.-
18	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	235.649.000.-
	38 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	156.014.000.-
	39 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	79.635.000.-
	JUMLAH ANGGARAN 2024	14.870.457.441.-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengembang amanah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD dan,
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang

≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

• **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

• **Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

• **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut :

Realisasi Kinerja \geq Target Kinerja	: Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja	: Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja $>$ Realisasi Tahun Sebelumnya	: Peningkatan
Realisasi Kinerja $<$ Realisasi Tahun Sebelumnya	: Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar $>0\%$ maka dikategorikan “**Efisien**”, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar $\leq 0\%$ maka dikategorikan “**Kurang Efisien**”.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan “**Efektif**” dan sebaliknya jika nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan ”**Kurang Efektif**”.

3.2. CAPAIAN KINERJA.

3.2.1. Analisis Capaian IKU (Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024)

Target Kinerja Tahun 2024 yang sudah dituangkan dalam Dokumen Penetapan Indikator Kinerja (IKU) telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pencapaian IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut maka realisasi capaian kinerja bisa diukur dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024*	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan : - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa dalam - Kopi - Pinang	Ton	127.419 3.890 56.549 1.207 10.909	156.381 2.829 55.202 1.127 14.042	122,73 72,72 97,62 93,37 128,72	
	Rata-rata Realisasi Sasaran 1						103,03

	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak : - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	Ekor	9.641 788 51.166 878 1.584.799	9.396 768 49.588 843 1.569.029	97,46 97,47 96,92 96,01 99,00	
	Rata-rata Realisasi Sasaran 2					97,37	Sangat Tinggi
	CAPAIAN KINERJA (RATA-RATA)					100,20	Sangat Tinggi

Sumber : Renstra Disbunak 2021-2026 dan Data ASEM Statistik Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100,20 % atau dikategorikan “Sangat Tinggi”, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan sebesar 103,03 % (Sangat Tinggi), rata-rata capaian kinerja Meningkatnya Populasi Ternak sebesar 97,37 % (Sangat Tinggi).

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.3.
Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2022			Tahun 2023			Tahun 2024*		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	- Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan :	Ton									
	- Kelapa Sawit		123.074	145.538	118,25	125.166	152.563	121,88	127.419	156.381	122,73
	- Karet		3.848	3.111	80,85	3.867	3.028	78,30	3.890	2.829	72,72
	- Kelapa dalam		55.490	54.081	97,46	55.989	54.265	96,92	56.549	55.202	97,62
	- Kopi		1.194	1.144	95,81	1.200	1.140	95,00	1.207	1.127	93,37
	- Pinang	Ekor	10.663	13.871	130,08	10.780	13.933	129,25	10.909	14.042	128,72
	- Jumlah Populasi Ternak										
	- Sapi		9.267	9.151	98,75	9.452	9.198	97,31	9.641	9.396	97,46
	- Kerbau		758	748	98,68	773	750	97,02	788	768	97,47
	- Kambing		49.180	48.010	97,62	50.163	48.350	96,38	51.166	49.588	96,92
2.	- Domba	%	845	809	95,74	861	799	92,79	878	843	96,01
	- Unggas		1.523.260	2.092.871	137,39	1.553.260	1.302.865	83,88	1.584.799	1.569.029	99,00
	- Nilai AKIP Perangkat Daerah		69.80	67.64	96,91	69.90	70.05	100,21	70.10	74.06	105,65
	- Nilai IKM Perangkat Daerah		80.30	85.04	105,90	80.35	85.04	105,84	80.40	79.98	99,48

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja IKU Tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya masih dalam pencapaian kategori baik yaitu diatas 90 % yaitu sebesar 99.46% atau dikategorikan "Sangat Tinggi".

Keberhasilan atas pencapaian kinerja ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain yaitu :

- 1). Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat dalam mengembang Misi ke-4 yaitu ***Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.***
- 2). Adanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Meskipun terdapat adanya faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja masih terdapat hambatan dan kendala antara lain yaitu :

1. Tingginya curah hujan dan adanya banjir pasang rob yang mengakibatkan debit air sungai menjadi tinggi sementara tanggul-tanggul disekitar lahan perkebunan dangkal sehingga air menggenangi kebun-kebun petani/pekebun.
2. Belum optimalnya penggunaan benih/bibit unggul.
3. Kurangnya SDM Petugas Teknis Perkebunan dan Paramedis.
4. Kurangnya pakan ternak yang berkualitas
5. Masih adanya serangan penyakit hewan menular.
6. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan.

Untuk mendukung misi ke-4 yaitu "***Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan***" tersebut ada beberapa program kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat melalui dana APBD. Untuk Tahun Anggaran 2024 kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman ini merupakan kegiatan untuk menjaga kelestarian SDG Tanaman Komoditi Perkebunan yang merupakan spesifik lokal seperti Kelapa Dalam Gambut, Kopi Libtukom dan Pinang Betara. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan jumlah Blok Penghasil Tinggi (BPT) yang terdapat pada kebun kelompok tani bisa bertahan dengan kondisi kebun yang terawat. Selain itu diharapkan dengan adanya Sosialisasi Penggunaan Benih Unggul bisa memacu pekebun untuk menggunakan benih unggul dalam berusaha di sektor perkebunan. Sedangkan untuk kebun yang telah ditetapkan sebagai BPT tahun 2024 ini mendapatkan bantuan pupuk dari dana APBN melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Adapun jumlah Pohon Induk Terpilih sampai dengan tahun 2024 yaitu untuk tanaman kelapa dalam sejumlah 3.717 PIK, tanaman pinang sejumlah 10.063 PIP dan 700 PIK untuk tanaman kopi.

2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) ini merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kebuntingan dan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk pelayanan kegiatan ini terdapat di 13 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pemeliharaan Kebun Percontohan Kopi Libtukom dan Kebun Percontohan Kelapa Sawit yang ada. Dengan adanya kegiatan ini kita tetap memelihara kebun percontohan yang ada melalui pemberian pupuk dan perlakuan sesuai dengan anjuran teknis. Selain itu nantinya hasil dari kegiatan ini adalah untuk menambah Pendapatan Daerah yang merupakan PAD dari Sektor Perkebunan.

4. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain

Tahun 2024 ini Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain hanya menganggarkan pengadaan ternak sapi penggemukan sebanyak 2 (dua) ekor dan ternak ayam unggas (DOC) sebanyak 5 (lima) kotak. Namun

tahun 2024 ini melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi melalui dana Dumisake, Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jambi dan APBD-P mendapatkan bantuan hibah berupa ternak sapi dan kambing yang disebar ke beberapa kelompok tani yaitu :

I. Bantuan Kegiatan melalui Dumisake

Adapun bantuan hibah yang diberikan berupa ternak sapi sebanyak 5 ekor kepada kelompok tani Doa Berkah Jaya Bersama Desa Rantau Benar Kecamatan Renah Mendaluh.

II. Bantuan Kegiatan melalui APBD-P Provinsi Jambi

Adapun bantuan hibah yang diberikan berupa ternak sapi pada kelompok tani Pinang Gading Jaya Desa Pinang Gading Kecamatan Merlung sebanyak 7 (tujuh) ekor, kelompok tani Tani Maju Jaya Desa Bukit Indah Kecamatan Muara Papalik sebanyak 7 (tujuh) ekor dan kelompok tani Bukit Makmur Desa Bukit Bakar Kec. Renah Mendaluh sebanyak 7 (tujuh) ekor.

III. Bantuan Kegiatan melalui Pokok-pokok Pikiran DPRD Prov. Jambi

Bantuan Hibah ternak yang diberikan melalui Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Jambi yaitu :

No.	Komoditi	Penerima	Lokasi
1.	Kambing (17 ekor)	KT. Berkah Bersama	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
2.	Sapi (5 ekor)	KT. Teladan	Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi
3.	Sapi (5 ekor)	KT. Terate Jaya Mandiri	Desa Pematang Tembesu Kec. Tungkal Ulu
4.	Sapi (5 ekor)	KT. Enggal Jaya	Desa Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi
5.	Sapi (5 ekor)	KT. Kenanga	Desa Adi Jaya Kec. Tebing Tinggi
6.	Sapi (5 ekor)	KT. Riski Sakti	Desa Pematang Lumut Kec. Betara
7.	Sapi (5 ekor)	KT. Sansibar	Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi
8.	Sapi (5 ekor)	KT. Sukojadi	Desa Cinta Damai Kec. Renah Mendaluh
9.	Sapi (5 ekor)	KT. Sakura Jaya	Desa Cinta Damai Kec. Renah Mendaluh
	Jumlah 57 ekor		

Sumber : data dari DTPHP Provinsi Jambi

5. Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk membantu petani dalam rangka peningkatan produksi komoditas perkebunan. Dari kegiatan ini diharapkan petani benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut untuk peningkatan kesejahteraan petani. Adapun bantuan hibah yang diberikan kepada kelompok tani berupa pupuk NPK tablet pada petani kelapa dalam sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Bantuan yang diberikan	Lokasi
1.	Karya Jaya II	340 kg	Desa Mekar Alam Kec. Seberang Kota
2.	Borneo Jaya	340 kg	Desa Betara Kiri Kec. Kuala Betara
3.	Cahaya Baru	600 kg	Desa Betara Kanan Kec. Kuala Betara
4.	Mugo Mulyo	1.100 kg	Desa Sungai Gebar Kec. Kuala Betara
5.	Berkah Makmur	520 kg	Desa Tungkal II Kec. Tungkal Ilir
6.	Bina Tani	400 kg	Desa Tungkal I Kec. Tungkal Ilir
7.	Hidup Bersama	440 kg	Desa Tungkal I Kec. Tungkal Ilir
8.	Harapan Maju	880 kg	Desa Bram Itam Kanan Kec. Bram Itam
9.	Sejahtera Baru	440 kg	Desa Bram Itam Kanan Kec. Bram Itam
10.	Sumber Bakti	520 kg	Desa Kemuning Kec. Bram Itam
11.	Sumber Rezeki	520 kg	Desa Kemuning Kec. Bram Itam
12.	Usaha Berkat	440 kg	Desa Tanjung Senjulang Kec. Bram Itam
13.	Sumber Rezeki I	400 kg	Desa Karya Maju Kec. Pengabuan
14.	Maju Jaya	620 kg	Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan
15.	Sido Muncul	680 kg	Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan
16.	Mugo Makmur	1.040 kg	Desa Sungai Pampang Kec. Pengabuan
17.	Rumpun Padi	360 kg	Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan
18.	Cemara	440 kg	Desa Kempas Jaya Kec. Pengabuan
19.	Rahayu	440 kg	Desa Kempas Jaya

			Kec. Pengabuan
20.	Harapan Maju	280 kg	Desa Teluk Ketapang Kec. Senyerang
21.	Mekar Sari	280 kg	Desa Teluk Ketapang Kec. Senyerang
22.	Tirto Sari	320 kg	Desa Teluk Ketapang Kec. Senyerang
23.	Intan Jaya	860 kg	Desa Sungai Landak Kec. Senyerang
24.	Lohjinawi	280 kg	Kel. Senyerang Kec. Senyerang
25.	Maju Makmur	280 kg	Kel. Senyerang Kec. Senyerang
26.	Tunas Muda II	320 kg	Kel. Senyerang Kec. Senyerang
27.	Cabang Jaya	780 kg	Desa Makmur Jaya Kec. Betara
28.	Sinar Rezeki	740 kg	Desa Makmur Jaya Kec. Betara
29.	Suka Maju	700 kg	Desa Makmur Jaya Kec. Betara
30.	Wono Catur	760 kg	Desa Makmur Jaya Kec. Betara

6. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar kelompok tani perkebunan dan peternakan yang ada bisa memanfaatkan bantuan hibah tersebut dan menjadi stimulan agar petani lebih giat lagi untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi serta pendapatan masyarakat /petani pekebun.

Adapun bantuan hibah yang diberikan kepada kelompok tani yaitu bantuan seng untuk lantai jemur pinang dengan kelompok tani penerima yaitu Kelompok Tani Subur Desa Teluk Pulai Raya Kecamatan Seberang Kota dengan jumlah seng gelombang plastik sebanyak 500 keping.

Selain itu Tahun 2024 ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan dana DAK fisik untuk Pembangunan Olahan Pakan Silase sebanyak 3 (tiga) unit dan tidak terlaksana dikarenakan lambatnya Juknis keluar, adanya kesalahan kode rekening belanja dan jadwal pembahasan APBD Perubahan 2024 dipercepat sedangkan pelaksanaan perubahan APBD Perubahan 2024 melewati batas akhir kotrak pengadaan.

7. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota ini dilaksanakan dengan maksud agar ternak yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini bisa terlayani untuk pengobatan, pemeriksaan kebuntingan, pemeriksaan spesimen, vaksinasi dan eliminasi.

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pengobatan	3.000 ekor	3.000 ekor	100
2.	PKB	1.500 ekor	1.500 ekor	100
3.	Pemeriksaan Spesimen	200 ekor	200 ekor	100
4.	Vaksinasi	2.000 ekor	2.000 ekor	100
5.	Eliminasi	20 Ekor	20 ekor	100

8. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah pakan ternak yang berkualitas pada peternak yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pakan ternak yang berkualitas bisa dimiliki oleh peternak untuk meningkatkan produksi daging ternak khususnya ternak sapi dan juga sebagai stimulan kepada peternak bahwa pakan ternak berkualitas sangat menentukan produksi daging ternak dan kesehatan ternak. Adapun kelompok tani yang mendapatkan bantuan hijauan pakan ternak pada tahun 2024 ini yaitu Kelompok Tani Maju Bersama Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi berupa Rumput Indigofera sebanyak 10 kg, Rumput Centro sebanyak 5 kg dan Rumput Odot sebanyak 240 kg.

9. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani tahun 2024 dimaksudkan untuk membantu petani atau kelompok tani dalam membantu transportasi petani dalam membawa hasil kebun mereka. Tahun 2024 ini untuk bantuan jalan usaha tani atau jalan produksi didapatkan dari dana DAK Fisik sebanyak 2 unit. Adapun kelembagaan petani yang mendapatkan bantuan kegiatan Jalan Usaha Tani atau Jalan Produksi yaitu :

- KT. Suka Maju di Desa Makmur Jaya Kecamatan Betara sebanyak 1 unit

- KT. Beringin Jaya di Desa Pembengis Kecamatan Bram Itam sebanyak 1 unit

10. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani tahun anggaran 2024 bersumber dari dana DAK Fisik dengan bantuan berupa Irigasi Air Tanah Dalam Perkebunan sebanyak 2 unit. Sama halnya dengan jalan usaha tani, Irigasi Air Tanah Dalam dimaksudkan untuk membantu kelompok tani dalam memperoleh air untuk pengairan kebun mereka sehingga tata airnya menjadi lancar. Adapun kelompok tani yang mendapatkan bantuan Jaringan Irigasi Usaha Tani sesuai dengan hasil CP/CL yaitu :

- KT. Tunas Harapan 2 di Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam sebanyak 1 (satu) unit.
- KT. Suka Maju di Desa Jati Mas Kecamatan Bram Itam sebanyak 1 (satu) unit

11. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan

Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan ini dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan produksi komoditi perkebunan. Melalui kegiatan ini dimaksudkan agar komoditi perkebunan tetap terlindungi dari serangan hama dan penyakit tanaman. Pengendalian OPT dilaksanakan secara kimia dan hayati. Pengendalian secara hayati dilaksanakan dengan pemberian jamur dan cendawan dengan melihat dan memonitor kondisi kebun yang akan dikendalikan. Secara kimia dilaksanakan melalui pemberian obat – obatan berupa insektisida dan herbisida yang sesuai dengan jenis komoditi yang terserang.

Pengendalian OPT yang dilakukan secara hayati pada tahun 2024 seluas 196 Ha dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengendalian Penyakit JAP pada tanaman kelapa sawit seluas 20 Ha di Desa Serdang Jaya Dusun Pinang Merah Kecamatan Betara.
2. Pengendalian Hama Kumbang Kelapa pada tanaman kelapa seluas 30 Ha di Desa Pasar Senin Kecamatan Pengabuan.
3. Pengendalian Hama kumbang kelapa pada tanaman kelapa seluas 20 Ha di Desa Pasar Senin Kecamatan Pengabuan.

4. Pengendalian Penyakit JAP pada tanaman kelapa sawit seluas 30 Ha di Desa Sungai Gebar Barat Kecamatan Kuala Betara.
 5. Pengendalian Hama Kumbang, JAP, Jamur Ganoderma dan Ulat Api pada Tanaman Kelapa Sawit dan Kelapa seluas 50 Ha pada kebun kelompok tani Sido Makmur di Desa Sungai Gebar Barat Kecamatan Kuala Betara.
 6. Pengendalian Hama Kumbang Kelapa/Trapping pada tanaman kelapa dalam seluas 50 Ha pada kebun kelompok tani Usaha Berkat Desa Pasar Senin Kecamatan Pengabuan.
 7. Pengendalian Hama Brontispa dan Penyakit JAP pada tanaman kelapa sawit seluas 30 Ha di Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam.
- 9. Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar bencana kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha perkebunan tidak terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui kegiatan pengendalian/pencegahan dan penanganan kebakaran lahan kebun, tim Dalkarlabun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan turun ke lapangan serta turun bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana, Kodim dan Polres jika bencana kebakaran terjadi.

Selain itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat juga mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang berada di 3 (tiga) kecamatan yang juga membantu dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran lahan dan kebun. Adapun KTPA dimaksud adalah sebagai berikut yaitu :

- 1) KTPA Karya Lestari Desa Muntialo Kecamatan Betara
- 2) KTPA Mekar Sari Desa Dataran Pinang Kecamatan Kuala Betara
- 3) KTPA Harapan Jaya Desa Sungai Baung Kecamatan Pengabuan

10. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar petani – petani yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya petani kelapa sawit untuk melegalkan usaha taninya. Dengan terdatanya petani pekebun kelapa sawit diharapkan kedepannya data kepemilikan kebun rakyat ini menjadi informasi pendukung dalam mengambil kebijakan.

Realisasi penerbitan STDB Tahun 2024 sebanyak 605 dengan luasan 1.103 Ha atau 729 persil.

11. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit (DBH Kelapa Sawit) Tahun 2024 dan sisa dana DBH Sawit Tahun 2023. Dasar pelaksanaan kegiatan ini yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PMK tersebut yaitu Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat, Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun.

Untuk kegiatan Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat dari target seluas 600 Ha terealisasi 587 Ha, Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan sudah teralisasi fisik dengan selesainya pembuatan Dokumen Matriks Rencana Aksi Daerah yang telah disusun. Sedangkan untuk Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun telah dilaksanakan sampai pada tahap sosialisasi dan pendataan satu kelompok tani atau kelembagaan yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana DBH Sawit tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi pekebun kelapa sawit.

12. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Pada kegiatan inilah pelatihan dan pembinaan terhadap petani dilakukan, pelatihan yang diberikan berupa pelatihan teknis dan pengembangan SDM. Adapun pelatihan yang diberikan berupa pelatihan untuk menumbuhkan kelembagaan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi serta merubah sikap dan perilaku petani.

Kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) antara lain :

1. Kelompok Sri Utomo II di Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Betara untuk 1 (satu) kelas
2. Kelompok Tani Rukun Sentosa Desa Parit Ponco Kecamatan Kuala Betara untuk 1

(satu) kelas

Kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Penguatan Kelembagaan antara lain yaitu :

1. Kelompok Tani Maju Bersama Desa Suak Samin Kecamatan Pengabuan untuk 1 kelas
2. Kelompok Tani Ci Kahuripan Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi untuk 1 kelas

Kelompok tani yang mendapatkan Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan antara lain yaitu Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi sedangkan untuk kelompok tani yang mendapatkan Pelatihan Pengolahan Hasil Perkebunan yaitu Kelompok Tani Suka Maju Desa Tanjung Senjulang Kecamatan Bram Itam. Selain itu juga dilaksanakannya kegiatan Pertemuan Asosiasi Petani Kelapa Dalam dan Asosiasi Petani Rempah dan Penyegar serta Pertemuan Penyuluhan Lapangan.

3.2.3. Analisa Capaian Program (OUTCOME) dan Kegiatan dan Sub Kegiatan (OUTPUT) Tahun 2024 yang mendukung Dalam Pencapaian Kinerja

Hasil Pencapaian Kinerja Tahun 2024 tentunya didukung oleh realisasi dari kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun yang dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.4.
REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJAB BARAT

Urusan Pilihan

Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegaitan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	(% Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Penanggung Jawab
Prog	Keg						
3.27.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	Sekretaris
3.27.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja,DPA,Evaluasi Renstra,Evaluasi Renja dan Lakip	13 dokumen	13 dokumen	100%	
3.27.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen	100%	
3.27.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	5 laporan	100%	
3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	1 laporan	1 laporan	100%	
3.27.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	42 orang/bulan	42 orang/bulan	100%	
3.27.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100%	
3.27.01.2.05		Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN	100 %	100 %	100%	
3.27.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	100%	
3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %	100 %	100%	

3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemda	100 %	100 %	100 %	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor yang Disediakan	2 unit	2 unit	100 %	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	9 unit	100 %	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	100 %	100 %	100%	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda	100 %	98,80 %	98,80%	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 unit	27 unit	96,43%	

3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	19 unit	100%	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	26 unit	100%	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan (%) 2. Angka Kebuntingan Sapi yang di Inseminasi Buatan (IB)	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,8%, karet = 0,6%, kelapa dalam = 1,0%, kopi = 0,6% pinang = 1,2% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 73 %	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,7%, karet = 0,2 %, kelapa dalam = 1,0%, kopi = 0,4% pinang = 1,0% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 73 %	87,77 %	Kabid Perkebunan dan Kabid Peternakan
3.27.02.2.02	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 %	100 %	100 %	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Bertambahnya luas Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam, Kopi dan Pinang 2. Tekelolanya kebun percontohan Kopi dan Kelapa Sawit serta tersedianya bibit unggul komoditi perkebunan 3. Jumlah Ternak yang di IB dan Sinkron	100 %	100 %	100 %	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang	3 VUB	3 VUB	100%	

	Hewan/Tanaman	Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanamani	1 dokumen	1 dokumen	100%	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	100%	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	1. Tersedianya Sapi Bakalan di Kandang, Ternak Sapi,Kambing dan Unggas yang dihibahkan 2. Tersedianya Bibit Hijauan Pakan Ternak	1. 800 ekor, 2. 0,8 ton	1. 732 ekor, 2. 11,55 ton	94,96%	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	502 ekor	732 ekor	145%	Bantuan ternak dari dana Pokir DPRD Prov. Jambi, Dumisake, APBDP Prov. Jambi, CSR dan Kemitraan 20%
3.27.02.2.06.02	Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0.25 ton	11.55 ton	462 %	Bantuan pakan ternak dari Pokir DPRD Prov. Jambi, Dumisake dan APBDP Prov. Jambi
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya	23 %	23 %	90.94%	Kabid Sapras/Sekretaris
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersusunnya dokumen tanggul perkebunan di 7 (tujuh) kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	97,83 %	
3.27.03.2.01.01	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas Kawasan Pertanian yang termanfaatkan	600 Ha	587 Ha	97,83%	

3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1. Bertambahnya Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan/Peternakan 2. Terkelolanya kebun percontohan kelapa sawit	1 dokumen	1 dokumen	75 %	
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	2 unit	100%	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 unit	1 unit	25 %	
3.27.03.2.02.10	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	3 unit	3 unit	100 %	
3.27.03.2.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.03.2.02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kematian Ternak	1,5 %	1,5 %	100 %	Kabid Peternakan
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak	100 %	100 %	100 %	
3.27.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.04.2.01	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan	1 laporan	1 laporan	100 %	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	1 laporan	100 %	

3.27.04.2.02	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adanya laporan pelayanan jasa medik veteriner	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.04.2.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Angka Penanggulangan serangan OPT dan gangguan usaha Perkebunan	100%	100%	107%	Kabid Perkebunan dan Kabid Peternakan
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terkendalinya OPT Perkebunan dan Kebakaran Lahan/Kebun Masyarakat	100 %	100 %	107 %	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	230 Ha	115 %	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	30 Ha	30 Ha	100 %	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan	750 STDB	605 STDB	80,67%	Kabid Sapras
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya petani pekebun yang mendapatkan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)	100 %	100 %	100%	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 dokumen	1 dokumen	100%	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan/Peternakan	30 %	30 %	100%	Kabid Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Meningkatnya Materi Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan dan Peternakan 2. Tersusunnya Data Komoditi Perkebunan/Peternakan	12 unit	12 unit	100 %	

3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 unit	10 unit	100 %	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 unit	2 unit	100 %	

Keterangan : OUTCOME dan OUTPUT telah menyesuaikan dengan APBD-P TA 2024

Sumber Data : E81 Triwulan IV bulan Desember 2024

3.2.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara keuntungan dan biaya, antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang digunakan dalam pelaksanaan, seperti halnya juga maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Untuk menghitung efisiensi sumber daya, perlu diuraikan target indikator kinerja yang mencapai 100% atau lebih, kemudian dihitung penyerapan anggaran atas program yang mendukung indikator kinerja sasaran tersebut.

Berikut tabel analisis efisiensi sumber daya atas pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 :

Tabel 3. 5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan:	103,03	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	91,18	11,85
		<ul style="list-style-type: none"> - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa dalam - Kopi - Pinang 	122,73 72,72 97,62 93,37 128,72	2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	39,85	63,18
				3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	77,41	25,62
2.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak :	97,37	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	91,18	6,19
		<ul style="list-style-type: none"> - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas 	97,46 97,47 96,92 96,01 99,00	2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	86,62	10,75

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator sangat tinggi. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran. Hanya saja terdapat satu Program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang serapan anggarannya tidak maksimal atau sebesar 39,85 % hal ini dikarenakan ada kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik tidak berjalan, namun hal tersebut tidak mengganggu kinerja program yang lain ataupun ada sasaran kinerja yang tidak tercapai.

3.2.5. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dari 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dalam upaya pencapaiannya memiliki beberapa kendala sebagaimana penjelasan berikut ini :

1. Dalam pencapaian Indikator jumlah produksi komoditi perkebunan yaitu peningkatan produksi komoditas strategis perkebunan, terdapat kendala berupa rendahnya harga komoditi perkebunan sementara biaya produksi atau pengolahan lahan tinggi, selain itu banyaknya petani yang beralih komoditi yang nilai jual hasil produksinya menjanjikan atau lebih mahal seperti komoditi kelapa sawit.
2. Untuk indikator bidang peternakan bahwa secara keseluruhan sudah baik dalam mencapai target dan sasaran kinerja, namun perlu sosialisasi yang lebih intensif kepada peternak untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara rutin dan menambah jumlah tenaga medis seperti paramedis dan dokter hewan.
3. Terbatasnya jumlah pegawai dan tenaga teknis yang ada dibandingkan dengan kebutuhan ideal yang harusnya ada pada dinas teknis.

Dari berbagai kendala tersebut diatas tentunya perlu dilakukan upaya – upaya untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja dinas antara lain sebagai berikut :

- Mencari alternatif solusi yang harus dilakukan dengan cara meningkatkan

teknik budidaya melalui intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan tanaman dan pengolahan pasca panen.

- Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada peternak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin dengan memanfaatkan Tenaga Kesehatan Hewan yang terdapat pada Puskeswan.
- Membuka peluang kerjasama dengan pihak – pihak luar seperti BUMD dan Pihak swasta lainnya dalam hal permodalan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan.
- Mengikuti bimtek atau pelatihan bagi petugas teknis.

3.3. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hakekatnya memerlukan ketersediaan sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya keuangan (anggaran pembangunan).

Dari segi pemanfaatan sumber daya alam, seperti sumber daya lahan, air, tanaman, plasma nutfah dan lain sebagainya, khususnya dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, sejauh ini telah dilakukan secara efektif dan efisien melalui berbagai upaya, antara lain dengan cara:

- Melakukan pengembangan sumber benih melalui eksplorasi, identifikasi, penilaian dan penetapan kebun induk terpilih, maupun pohon induk terpilih, inventarisasi kekayaan plasma nutfah tanaman perkebunan, dan lain sebagainya;
- Mengembangkan lahan-lahan yang idle untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan, melalui upaya perluasan, peremajaan, intensifikasi serta pendukungan prasarana perkebunan, seperti pengembangan sumber daya air, optimasi lahan dan irigasi pada lahan perkebunan;
- Melakukan pengembangan kaji terap teknologi budidaya perkebunan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perkebunan;
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur perkebunan, dalam rangka meningkatkan kinerja OPD dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, pengembangan benih unggul, pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan, serta pengolahan produk perkebunan.

Berdasarkan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Meningkatnya produksi komoditi perkebunan diatas 100% (103,03%). Pencapaian kinerja ini dinilai SANGAT TINGGI. Namun kedepannya perlu dipertahankan dan dilakukan upaya untuk lebih baik lagi.
- Meningkatnya populasi ternak diatas 90% (97,37%). Pencapaian kinerja ini dinilai SANGAT TINGGI. Namun kedepannya perlu dilakukan upaya yang lebih baik lagi.

3.4. REALISASI ANGGARAN (REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH), EFEKTIVITAS ANGGARAN dan EFISIENSI ANGGARAN

3.4.1. REALISASI PENDAPATAN DIBANDINGKAN DENGAN TARGET

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga termasuk OPD yang menyumbangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari Pengelolaan Komoditi Perkebunan dan Peternakan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat**

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp.) Tahun 2024	Realisasi (Rp.) Tahun 2024	%
A.	Pendapatan Asli Daerah	51.000.000,-	53.194.150,-	104.30
	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	51.000.000,-	53.194.150,-	104.30
1	Hasil Penjualan Tanaman	41.000.000,-	37.194.150,-	90.72
2	Hasil Penjualan Hewan	10.000.000,-	16.000.000,-	160
Jumlah		51.000.000,-	53.194.150,-	104.30

Sumber data : Laporan realisasi anggaran dan pendapatan dan belanja Disbunak tahun 2024

3.4.2. REALISASI BELANJA DAERAH

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah. Untuk Tahun 2024 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 11.465.217.166.- (77.10 %) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 14.870.457.441.- dan dapat dilihat pada uraian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2024
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat

No	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	BELANJA DAERAH	14.870.457.441.-	11.465.217.166.-	77.10
I.	Belanja Operasi	14.524.819.441.-	11.129.032.739.-	76.62
1.1	Belanja Pegawai	4.679.768.372.-	4.326.245.396.-	92.45
1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.366.451.069.-	6.354.430.343.-	67.84
1.3	Belanja Hibah	478.600.000.-	448.357.000.-	93.68
II.	Belanja Modal	345.638.000.-	336.184.427.-	97.26
	JUMLAH	14.870.457.441.-	11.465.217.166.-	77.10

Sumber data : Laporan realisasi anggaran dan pendapatan dan belanja Disbunak tahun 2024

Untuk rincian belanja per kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana terinci dibawah ini :

TABEL 3.7
REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISAS IFISIK (%)
			Rp.	%	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.755.114.072.-	6.272.270.920.-	92.85	92.00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.582.100.-	165.762.000.-	89.41	93.40
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.450.100.-	34.825.000.-	84.02	91.99
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.132.000.-	130.937.000.-	94.79	94.81
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.700.768.372.-	4.338.245.396.-	93.04	95.15
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.481.408.372.-	4.132.325.396.-	92.21	95.03
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	219.360.000.-	205.920.000.-	93.87	95.27
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.600.000.-	65.370.000.-	96.70	100
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.600.000.-	65.370.000.-	96.70	100
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.131.700.-	655.947.122.-	86.22	88.10
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.898.000.-	4.253.500.-	72.12	75.00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.066.000.-	79.153.000.-	94.16	96.34

3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.495.000.-	45.630.000.-	98.14	90.00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.742.500.-	25.337.700.-	60.70	74.13
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000.-	4.880.000.-	97.60	100
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	524.930.200.-	496.692.922.-	94.62	93.12
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.358.000.-	92.143.000.-	99.85	100
3.27.01.2.07.01	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	72.590.000.-	72.375.000.-	99.70	100
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.768.000.-	19.768.000.-	100	100
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.546.000.-	302.722.130.-	85.92	88.27
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.800.000.-	4.939.000.-	72.63	72.65
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.546.000.-	68.763.130.-	85.21	92.17
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.200.000.-	229.020.000.-	99.92	100
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.128.200.-	652.081.272.-	94.39	94.60
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	191.838.000.-	166.217.400.-	86.64	87.64
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.470.200.-	194.654.345.-	92.05	92.25
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.540.000.-	20.340.000.-	99.03	98.52

3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.280.000.-	270.869.527.-	99.85	99.99
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.448.894.650.-	1.321.158.400.-	91.18	97.00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	538.225.000.-	494.025.000.-	91.79	98.48
3.27.02.2.01.01	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	538.225.000.-	494.025.000.-	91.79	98.48
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	765.579.650.-	683.628.500.-	91.61	94.41
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	91.585.000.-	89.335.000.-	97.54	97.53
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	377.407.650.-	319.833.500.-	84.74	92.90
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	296.587.000.-	274.460.000.-	92.54	92.81
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	145.090.000.-	143.504.900.-	99.19	99.68
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	110.590.000.-	109.097.900.-	98.65	99.35
3.27.02.2.06.02	Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	34.500.000.-	34.407.000.-	99.73	100
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.057.840.698.-	1.617.147.300.-	39.85	66.00
3.27.03.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.795.926.750.-	603.647.300.-	33.61	81.00
3.27.03.01.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1.795.926.750.-	603.647.300.-	33.61	81.00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.178.663.948.-	933.000.000.-	64.84	65.01

3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	600.000.000.-	570.000.000.-	95.00	95.00
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	324.000.000.-	308.350.000.-	95.17	95.68
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.254.663.948.-	54.650.000.-	4.36	4.36
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	83.250.000.-	80.500.000.-	96.70	96.70
	Pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	83.250.000.-	80.500.000.-	96.70	96.70
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.895.556.091.-	1.641.963.295.-	86.62	96.00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.844.198.591.-	1.590.605.796.-	81.67	95.71
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam satu Kab/Kota	1.844.198.591.-	1.590.605.796.-	86.25	88.17
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	15.464.500.-	15.464.500.-	100	100
3.27.04.2.02.01	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk dan media pembawa penyakit hewan (HPM)	15.464.500.-	15.464.500.-	100	100
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.711.000.-	35.711.000.-	100	100
3.27.04.2.03.01	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	35.711.000.-	35.711.000.-	100	100
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	334.622.930.-	259.033.250.-	77.41	82.00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	334.622.930.-	259.033.250.-	79.48	81.64

3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	140.863.530.-	130.413.250.-	92.58	94.43
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	193.759.400.-	128.620.000.-	66.38	68.85
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	142.780.800.-	131.120.000.-	91.83	91.96
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	142.780.000.-	131.120.000.-	91.83	91.96
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	142.780.000.-	131.120.000.-	91.83	91.96
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	235.649.000.-	222.524.000.-	94.43	97.00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	235.649.000.-	222.524.400.-	93.40	96.84
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	156.014.000.-	150.689.000.-	96.59	96.90
3.27.07.2.01.03	Penyediaan Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	79.635.000.-	71.835.000.-	90.21	96.79
	JUMLAH	14.870.457.441.-	11.465.217.166.-	77.10	88.86

Keterangan : OUTCOME dan OUTPUT telah menyesuaikan dengan APBD-P TA 2024 OPD,

SUMBER DATA LPPK BULAN DESEMBER 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Keuangan sebesar **77,10%** (**Tujuh puluh tujuh koma sepuluh persen**) dan Realisasi fisik sebesar **88,86%** (**Delapan puluh delapan koma delapan puluh enam persen**), rincian anggaran belanja tahun 2024 tersebut semuanya telah tertuang didalam **APBD-P TA 2024**.

3.4.3. EFEKTIVITAS ANGGARAN.

Keputusan Mendagri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996 mendefinisikan efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real Dinas.

Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan yang terlihat dalam tabel tingkat efektivitas dihitung pada tahun 2024. **Tingkat Efektivitas** digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

Tingkat Efektivitas Anggaran	
A	Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti <i>Sangat Efektif</i>
B	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90% sampai 100% berarti <i>Efektif</i>
C	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80% sampai 90% berarti <i>Cukup Efektif</i>
D	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60% sampai 80% berarti <i>Kurang Efektif</i>
E	Hasil perbandingan tingkat pencapaian kurang 60% berarti <i>Tidak Efektif</i>

Berdasarkan tabel 3.6 Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat diatas, maka Tingkat **efektivitas anggaran** belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	%	Skor (Penilaian)

1	2	3 = (2/1)	4
Rp. 14.870.457.441.-	Rp. 11.465.217.166.-	77.10	Kurang Efektif

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Tingkat ***Efektivitas Anggaran*** Belanja pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu "Kurang Efektif". Adapun berbagai kendala dalam pencapaian Tingkat ***efektivitas anggaran*** belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- Adanya kegiatan yang bersumber dari dana DBH Sawit yaitu pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.795.926.750.- hanya terealisasi sebesar Rp. 603.647.300.- atau sebesar 33,61 %. Hal ini dikarenakan adanya salah satu rincian kegiatannya yaitu Pendampingan Sertifikasi ISPO Pekebun yang baru dilaksanakan sampai dengan tahap sosialisasi. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM petugas teknis perkebunan yang memahami mekanisme atau tahapan dari proses Sertifikasi ISPO tersebut sehingga di tahun mendatang petugas teknis akan mengikuti Pelatihan Sertifikasi ISPO serta berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Adanya kegiatan yang bersumber dari dana DAK Fisik yaitu pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.254.663.948.- teralisasi sebesar Rp. 54.650.000.- atau sebesar 4,36 %. Adapun kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pembangunan Bank Pakan Olahan Silase sebanyak 3 (tiga) unit yang tidak bisa terealisasi dikarenakan lambatnya juknis pelaksanaan kegiatan disahkan yaitu di bulan Juni 2024, adanya kesalahan kode rekening belanja dan jadwal pembahasan APBD Perubahan 2024 dipercepat sedangkan pelaksanaan Perubahan APBD 2024 melewati batas akhir kontrak pengadaan.

3.4.4. EFISIENSI ANGGARAN.

Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996

mengelompokkan Efisiensi sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Anggaran	
A	Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti Tidak Efisien
B	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90% sampai 100% Kurang Efisien
C	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80% sampai 90% berarti Cukup Efisien
D	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60% sampai 80% berarti Efisien
E	Hasil perbandingan tingkat pencapaian kurang 60% berarti Sangat Efisien

Tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat

Realisasi Anggaran	Total Anggaran/Belanja	%	Skor (Penilaian)
1	2	3 = 1/2	4
Rp. 11.465.217.166.-	Rp. 14.870.457.441.-	77.10	Efisien

Dari realisasi anggaran APBD pada tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun anggaran 2024 sebesar **88.86 %** dengan realisasi anggaran sebesar **77.10 %** artinya bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa mengefisiensikan penggunaan dana anggaran tahun 2024 sebesar 22,90 % dengan tingkat efisiensi anggaran Efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan berdasarkan PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2024, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran dan Indikator Kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 77,10% dari anggaran indikatif yang direncanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU (Indikator Kinerja Utama) yang disajikan pada tabel di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil masing-masing dari ke 2 (dua) indikator kinerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 yaitu :
 - Meningkatnya produksi komoditi perkebunan diatas 100% (103,03%). Pencapaian kinerja ini dinilai SANGAT BAIK. Namun kedepannya perlu dipertahankan dan dilakukan upaya untuk lebih baik lagi.
2. Sasaran 2 yaitu :
 - Meningkatnya populasi ternak diatas 90% (97,37%). Pencapaian kinerja ini dinilai SANGAT BAIK. Namun kedepannya perlu dipertahankan dan dilakukan upaya

yang lebih baik lagi.

Sedangkan untuk Realisasi Keuangan Tahun 2024 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini sebesar 77.10 % atau sebesar **Rp. 11.465.217.166,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 14.870.457.441,-**.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen Laporan Kinerja.
3. Laporan Kinerja (LKj) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya

Kuala Tungkal, Januari 2025

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



NIP. 19740306 200012 1 001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RIDUWAN
Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan Peternakan

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag.
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 3 Januari 2024

Pihak Kedua


Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag.

Pihak Pertama


Drs. RIDUWAN
NIP. 19740306 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan secara Optimal	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (ton) :					
		- Kelapa Sawit	127,419				
		- Karet	3,890				
		- Kelapa Dalam	56,549				
		- Kopi	1,207				
		- Pinang	10,909				
2.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (ekor) :					
		- Sapi	9,641				
		- Kerbau	788				
		- Kambing	51,166				
		- Domba	878				
		- Unggas	1,584,799				
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	70.10				
		- Nilai IKM Perangkat Daerah	80.40				

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 2,353,807,350.00	APBD Kabupaten
2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 2,261,900,000.00	
1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp. 2,178,650,000.00	
Sub. Kegiatan		
1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp. 600,000,000.00	APBN (DAK FISIK)
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp. 54,650,000.00	APBD Kabupaten
- Pembangunan Olahan Pakan Silase	Rp. 1,200,000,000.00	APBN (DAK FISIK)
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp. 44,000,000.00	APBD Kabupaten
- Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Perkebunan	Rp. 280,000,000.00	APBN (DAK FISIK)
1. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 83,250,000.00	APBD Kabupaten
Sub. Kegiatan		
1. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak Rumpun/Galur Ternak	Rp. 83,250,000.00	
3. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 1,931,556,091.00	
1. Kegiatan Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Rp. 1,880,198,591.00	

Wabah Penyakit Hewan Menular
Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan

1. Pemberantasan Penyakit Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	736,748,591.00	APBD Kabupaten
- Operasional Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	Rp.	1,143,450,000.00	APBN (DAK NON FISIK)
1. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	15,646,500.00	APBD Kabupaten
Sub. Kegiatan			
1. Pengawasan dan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Rp.	15,646,500.00	
1. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	35,711,000.00	APBD Kabupaten
Sub. Kegiatan			
1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp.	35,711,000.00	
4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	334,622,930.00	APBD Kabupaten
5. Perizinan Usaha Pertanian	Rp.	142,780,000.00	APBD Kabupaten
6. Penyuluhan Pertanian	Rp.	235,649,000.00	APBD Kabupaten
7. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6,140,037,042.00	APBD Kabupaten

Jumlah	13,400,352,413.00	Keterangan

Kuala Tungkal, 3 Januari 2024

Bupati Tanjung Jabung Barat
(Pihak Kedua)

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
(Pihak Pertama)

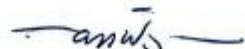
Drs. RIDUWAN
NIP. 19740306 200012 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 10 bulan berikutnya - 12 laporan
2.	Menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian - Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Februari 2024 - 92%
3.	Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Setiap Triwulan dan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - 20 Januari 2024 - 5 laporan
4.	Menyampaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi, IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian - Nilai AKIP Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - 20 Januari 2024 - B
5.	Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian - Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Januari 2024 - 1 laporan LPPD OPD
6.	Menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Februari 2024 - 1 laporan
7.	Menyampaikan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah bahan, data penyusunan LKPj 	<ul style="list-style-type: none"> - Januari 2024 - 2 bahan penyusun LKPj
8.	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian - Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN 	<ul style="list-style-type: none"> - 31 Maret 2024 - 100%
9.	Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah rekomendasi BPK RI dan Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Januari 2024 - 1 laporan
10.	Menyampaikan laporan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah laporan TPP yang disampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 10 bulan berikutnya - 360 laporan

Kuala Tungkal, 3 Januari 2024

Bupati Tanjung Jabung Barat
(Pihak Kedua)



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
(Pihak Pertama)



Drs. RIDUWAN
NIP. 19740306 200012 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PERKEBUNAN TAHUN 2024

BANTUAN HIBAH PUPUK NPK TABLET KEPADA PETANI KELAPA DALAM DI TANJUNG JABUNG BARAT SEBAGAI UPAYA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KELAPA DALAM



PENANGANAN SERANGAN OPT PADA LAHAN KEBUN MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PERKEBUNAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



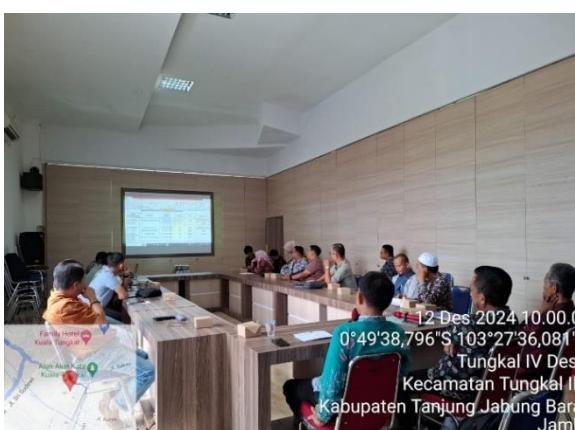
PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA KEPATUHAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN UNTUK MENJALANKAN KEWAJIBAN BERDASARKAN PERMENTAN NOMOR 18 TAHUN



BANTUAN BIBIT KELAPA DALAM SELUAS 100 HA DAN PUPUK ORGANIK UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI KELAPA DALAM DI TANJUNG JABUNG BARAT



PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN DAN PERTEMUAN DENGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PENYELESAIAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN (GUP) DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT





MONITORING KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN TANJUNG BARAT BARAT



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PETERNAKAN TAHUN 2024

PELATIHAN TERNAK UNGGAS AYAM DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



DISTRIBUSI HIBAH TERNAK UNGGAS AYAM DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



DISTRIBUSI HIBAH PAKAN TERNAK UNGGAS AYAM DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KEGIATAN PENILAIAN TERNAK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BANTUAN TERNAK SAPI DARI CSR PT. PETROCHINA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT





PENGAWASAN HEWAN QURBAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERTEMUAN PETUGAS PENGAWASAN HEWAN QURBAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2024

PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI DANA DAK TAHUN 2024





PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI DANA DAK TAHUN 2024



KEGIATAN SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA KELAPA SAWIT



PEMBERIAN BANTUAN HIBAH SENG UNTUK LANTAI JEMUR PINANG TAHUN ANGGARAN 2024

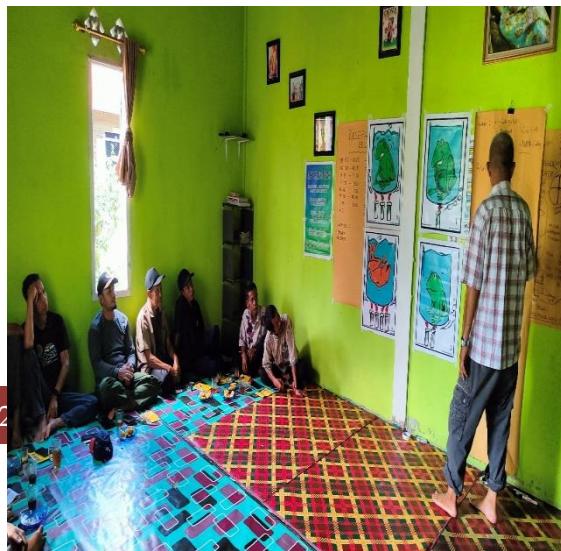


Part Lapis Sungai Raya RT.10
Soliukun
09.10.2024 17:53
-0.78419, 103.24961



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PENYULUHAN TAHUN 2024

PELATIHAN SISTEM KEBERSAMAAN EKONOMI (SKE) TAHUN 2024



PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2024



PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN TAHUN 2024



PELATIHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI TAHUN 2024

